

“Buku yang ada di tangan Anda ini merupakan kumpulan 13 tulisan yang mencoba melihat secara mendalam fenomena perubahan eksistensi dan peran Kiai tradisional yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hipotesis umum yang berkembang adalah bahwa, terutama seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, eksistensi dan peran Kiai tradisional di banyak daerah di Indonesia saat ini telah semakin terpinggirkan. Kehadiran internet, dan terlebih media sosial, saat ini telah banyak mengubah pola dan model otoritas Kiai tradisional dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat “pinggiran” Indonesia. Kiai tradisional kini tidak lagi “pusat”, Kiai tradisional kini bukan segala-galanya. Namun, benarkah asumsi-asumsi hipotetikal seperti di atas?

Buku ini menyingkap dengan gamblang bagaimana terjadinya perubahan eksistensi dan peran Kiai tradisional dalam berbagai sisi kehidupan—keagamaan, sosial, politik, budaya, ekonomi, teknologi, kesehatan, agraria, dan lingkungan—di beberapa daerah “pinggiran” (baca: lokal-perifer) Indonesia dewasa ini. Buku ini layak dibaca oleh para pemerhati, peneliti, dosen dan mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu relasi peran agama, tokoh agama dan perubahan sosial di Indonesia.”

Medhy Aginta Hidayat, S.S. M.Si., Ph.D
Ketua Pusat Studi Sosiologi dan Pengembangan Masyarakat (PS2PM), Program Studi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo Madura

Diterbitkan atas kerjasama:



Pusat Studi Sosiologi dan Pengembangan Masyarakat (PS2PM), Universitas Trunojoyo Madura dan Penerbit Fusta Media, Gresik.



Editor
Mohammad Afifuddin
Mohtazul Farid

Agama, Kiai Tradisional
dan Perubahan Sosial

Sudut Pandang dari
Pinggiran Indonesia

Agama, Kiai Tradisional, dan Perubahan Sosial

Sudut Pandang dari Pinggiran Indonesia

EDITOR

MOHAMMAD AFIFUDDIN
MOHTAZUL FARID



Digital Repository Universitas Jember

Agama, Kiai Tradisional, dan Perubahan Sosial

Sudut Pandang dari Pinggiran Indonesia

EDITOR

MOHAMMAD AFIFUDDIN

MOHTAZUL FARID





***Agama, Kiai Tradisional,
dan Perubahan Sosial***

Sudut Pandang dari Pinggiran Indonesia

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

***Agama, Kiai Tradisional,
dan Perubahan Sosial***

Sudut Pandang dari Pinggiran Indonesia

Wasisto Raharjo Jati, dkk.

Editor:

**Mohammad Afifuddin,
Mohtazul Farid**

Agama, Kiai Tradisional, dan Perubahan Sosial: Sudut Pandang dari Pinggiran Indonesia

Penulis : Wasisto Raharjo Jati, dkk.

Editor : **Mohammad Afifuddin,
Mohtazul Farid**

Desain Sampul : **Farisi AI**

Layout : **Ayu Apriani Ismawati**

Cetakan Pertama, Oktober 2021
xvi+ 324 halaman; 14 cm x 20 cm

ISBN : 978-623-6321-95-9

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2021 by RFM Pramedia

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penerbit

CV. RFM Pramedia
Jember - Indonesia

Bekerja sama dengan:

Pusat Studi Sosiologi dan Pengembangan Masyarakat
(PS2PM)

Program Studi Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya

Universitas Trunojoyo Madura

KATA PENGANTAR

Kiai dan Survivalisme Peran dalam Himpitan Perubahan Sosial Mutakhir

Surokim, S.Sos., M.Si

*Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB),
Universitas Trunojoyo Madura (UTM)*

Membincang Kiai dan perubahan sosial selalu saja menarik. Tidak saja terkait konteks, sejarah, dan proyeksi peran kekinian dan masa depan, tetapi juga kekhasan dinamika yang menyertai di dalam masyarakat negara berkembang. Dalam konteks perubahan sosial, adaptasi dan perubahan peran berbagai aktor dan kelompok strategis memang tak terelakkan. Ada yang mengalami peningkatan peran dan ada juga yang mengalami degradasi peran. Namun, peran Kiai selalu saja tetap unik dan khas. Peran Kiai selalu dinamis yang kadang-kadang juga tak selalu bisa didekati dan dipahami secara logis-sains, tetapi juga butuh pemahaman transendental. Hal inilah yang membuat peran Kiai dan dinamika di dalam masyarakat cenderung kompleks, rumit, dan menjadi salah satu sentra perhatian, khususnya dalam konteks kajian perubahan sosial. Apalagi pendekatan ilmu sosial kini tidak lagi tunggal, membuat kajian tentang Kiai dan dinamikanya selalu menjadi menarik dan selalu *up to date*, terbaharukan dengan multiperspektif dan multidisipliner.

Memahami posisi ulama (Kiai) dalam dinamika kemasyarakatan tentu saja tidak mudah dan tidak sederhana. Jika dilihat dalam konteks sejarah kita selalu disuguhi posisi dan peran Kiai (ulama) selalu bisa melampaui zamannya, strategis dan terus terlibat dalam kontes dan *interplay* politik secara berkelanjutan. Belum lagi jika perspektif itu diperluas dengan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... v
Daftar Isi..... xiv

(1) Pergeseran Peran Kiai dari *Cultural Broker* menuju *Veto Player* dalam Politik di Indonesia1

Wasisto Raharjo Jati- *Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*

(2) Pesantren Pro Ekologis: Upaya Kiai Tradisional dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup30

Wahyu Eka Styawan- *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/ Universitas Brawijaya*

(3) Kiai dan Santrinya: Alterasi Politik Lokal dalam Ruang Demokrasi.....72

Dien Vidia Rosa dan Hery Prasetyo- *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember*

(4) Pesantren di Arus Pinggiran Sistem Pendidikan Nasional: Tinjauan Kritis Politik Kebijakan Pemerintah terhadap Pesantren 110

Mohammad Afifuddin- *Program Studi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo Madura*

(5) Kiai sebagai Aktor *Free Rider Group* dalam Penguasaan Lahan Pertanian dan Pesisir Madura ..129

Iskandar Dzulkarnain- *Program Studi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo Madura*

(6) Otoritas Keagamaan Kiai Kampung dan Pengaruh Media Sosial dalam Mengkonstruksi Islam Lokal.....	153
<i>Wiwik Setiyani dan Siti Azizah- Program Studi Agama-Agama, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya</i>	
(7) Satu Kiai Dua Partai: Akrobat Politik Kiai Abdullah Sani menuju Kursi Wakil Gubernur Jambi	181
<i>Yudi Armansyah dan Yulfi Alfikri Noer- Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi</i>	
(8) Kiai dan Santri Virtual: Adaptasi Pondok Pesantren terhadap Perubahan Sosial di Era Digital.....	199
<i>Mohtazul Farid- Program Studi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo Madura</i>	
(9) Kiai dan Praktik Pernikahan Dini di Madura.....	222
<i>Yudho Bawono- Program Studi Psikologi, FISIB, Universitas Trunojoyo Madura</i>	
(10) Peran Kiai Pondok Pesantren al-Khairat Gorontalo terhadap Kesehatan Masyarakat melalui Perguruan Tenaga Dalam	252
<i>Momy A. Hunowu dan Hatim Badu Pakuna- Program Studi Sosiologi Agama, IAIN Sultan Amai Gorontalo dan Program Studi Aqidah Filsafat Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo</i>	

(11) Moderasi Beragama Kiai dan Pesantren Timur Indonesia	269
<i>Imam Mash'ud- Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado</i>	
(12) Gerakan Dakwah Kiai Muda di Indonesia Timur: Studi Model Islam dan Islamisasi Khas As'adiyah	286
<i>Muhammad Alwi HS- Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta</i>	
(13) Kiai, Pesantren, dan Pemenangan Politik Lokal: Studi Pilkada Sidoarjo 2020	311
<i>Agus Machfud Fauzi dan Novi Fitia Maliha- Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya dan Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo</i>	



(3)

Kiai dan Santrinya: Alterasi Politik Lokal dalam Ruang Demokrasi

Dien Vidia Rosa dan Hery Prasetyo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Secara empiris beberapa wilayah di Jawa Timur yang menggunakan jejaring pondok pesantren untuk meraih legitimasi politik masih terkategori sebagai daerah miskin. Konsekuensinya, indeks pembangunan manusia, pelayanan publik, hingga akses kesehatan menjadi pertarungan dalam proses pembangunan daerah. Hal tersebut memunculkan paradoks kekuatan politik berbasis kelompok Islam tradisional yang ditopang oleh ketokohan Kiai meskipun di sisi lain tidak diimbangi literasi publik. Muncul pertanyaan, apakah pondok pesantren tidak mempersiapkan diri untuk menggerakkan transformasi sosial? Ilmuwan berasumsi bahwa politik Islam dipergunakan sebagai instrumen politik namun tidak menjamin perubahan sosial. Asumsi lain menyatakan demokrasi menempatkan Kiai mampu masuk dalam ruang politik tetapi kapasitas untuk mentransfigurasi kekuatan pesantren hanya berorientasi pada pendidikan. Studi ini mengargumentasikan: pertama, terdapat perebutan legitimasi antar jejaring politik Islam tradisional yang berkontribusi pada penciptaan friksi di tataran masyarakat sipil. Kedua, *trah* pesantren dan kontestasi politik belum diimbangi oleh kapasitas masyarakat sipil untuk mengkondisikan arah transisi demokrasi. Dan ketiga, isu formasi masyarakat sipil antara elitisme Kiai dan basis massa masih menyisakan kesenjangan karena secara turun temurun dihidupi melalui struktur yang memisahkan keduanya.

dalam menciptakan efek kuasa untuk menjangkau ruang-ruang sosial terluar. Pengertian tersebut berkonsekuensi pada ketiadaan sisa reproduksi ruang-ruang sosial, dari yang berdimensi politik hingga yang berorientasi pada praktik beragama dan berkepercayaan. Islam politik merupakan kerangka konseptual untuk membingkai dan melukiskan bagaimana keberadaan negara selalu direpresentasikan oleh kehadiran elite yang mampu membangun kepercayaan dan menciptakan intimitas.

Sekali lagi, memisahkan antara politik dan persoalan umat menjadi bagian yang terus dibicarakan, khususnya pada praktik penegasan ideologi negara yang tertandingi oleh persoalan maraknya penggunaan politik identitas. Islam politik yang sebagian besar berada di wilayah tapal kuda dihadapkan dengan aporia politik identitas, di mana klaim jumlah dan angka menjadi bahasa elite untuk menyakinkan basis massa. Sementara itu, wacana yang menginginkan Kiai terlibat secara kritis dalam proses berdemokrasi, bahkan mendorong untuk menduduki posisi-posisi strategis pemerintahan, seakan bertemu dengan agenda politik yang digaugkan oleh partai-partai di Senayan.

“Jas Hijau” atau “jangan sekali-sekali menghilangkan jasa ulama” secara simbolik dipergunakan untuk membedakan sekaligus melawan wacana dominan yang menempatkan kelompok nasionalis sebagai penguasa. Antara merah dan hijau, angka dan data, merupakan bagian yang perlu dibicarakan bukan hanya dalam konteks politik ataupun seputar ukuran-ukuran statistik, tetapi sebagai kebutuhan untuk melihat konsekuensi politik identitas yang tidak serta-merta membawa pada penciptaan kesejahteraan.

Ruang sosial yang terbentuk pada wilayah menengah dan pinggiran merupakan ruang yang dibentuk melalui imajinasi pusat kekuasaan. Melalui formasi tersebut, subjek yang hadir mencoba untuk merebut dominasi yang direpresentasikan melalui angka yang didapatkan melalui

negosiasi-negosiasi. Secara dinamis, membayangkan hegemoni yang dapat dibentuk oleh basis Islam politik, baik dalam bingkai kultural maupun jejaring karismatik elite perlu dikedepankan untuk melihat kontradiksi yang muncul dalam indikator-indikator pembangunan. Sekali lagi, wilayah pinggiran tidak saja meninggalkan Islam politik, dimana relasi Kiai dan santri menjadi karakter pembeda di dalamnya, tetapi perlu juga ditempatkan sebagai cara untuk merepresentasikan pasang surutnya dukungan yang muncul dalam kebutuhan praktis yang terbingkai secara ideologis.

Daftar Pustaka

- Ali-Fauzi, I. (2018, May 16). Nationalism and Islamic Populism in Indonesia. *Heinrich-Böll-Stiftung Southeast Asia*. <https://Th.Boell.Org/En/2018/05/16/Nationalism-And-Islamic-Populism-Indonesia>
- Anderson, B. R. O. (2018). I. The Idea of Power in Javanese Culture. In *Language And Power* (pp. 17–77). Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501720604-002>
- Antlov, H., & Semedi, P. (2003). *Negara Dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal*. Lappera Pustaka Umum.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Aturan Perundang-Undangan Dan Turunannya*. <https://www.bps.go.id/menu/8/peraturan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka*. Badan Pusat Statistik. https://www.bappenas.go.id/files/data/pengembangan_regional_dan_otonomi_daerah/statistik%2070%20tahun%20indonesia%20merdeka.pdf
- Baswir, R. (2006). *Mafia Berkeley dan krisis ekonomi Indonesia*. Pustaka Pelajar.

- Beatty, A. (2012). Kala defanged: Managing power in Java away from the centre. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 168(2-3), 173-194. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003558>
- Biro Pusat Statistik. (1972). *Sensus Penduduk 1971* (Seri B No. 1; Issue Seri B No. 1). Biro Pusat Statistik.
- Biro Pusat Statistik. (2020). *Gini Ratio Maret 2020 Tercatat Sebesar 0,381*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1748/gini-ratio-maret-2020-tercatat-sebesar-0-381.html>
- Biro Pusat Statistik Kabinet Menteri Pertama. (1962). *Sensus Penduduk 1961 Republik Indonesia*. Biro Pusat Statistik.
- Bruinessen, M. V. (1999). *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*. Yayasan Bentang Budaya.
- Bruinessen, M. van. (1994). *Nu: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. LKiS & Pustaka Pelajar.
- Buehler, M. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316417843>
- Gerry, K., & Berenschot, W. (Eds.). (2016). *In Search of Middle Indonesia: Kelas Menengah Di Kota-kota Menengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hefner, R. W. (2018). Which Islam? Whose Shariah? Islamisation and citizen recognition in contemporary Indonesia. *Journal of Religious and Political Practice*, 4(3), 278-296. <https://doi.org/10.1080/20566093.2018.1525897>

- Heryanto, A. (2015). *Identitas dan kenikmatan: Politik budaya layar Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Indrajat, H. (2016). Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi. *Unila Jurnal Sosiologi*, 18(1), 53–62. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v18i1.72>
- Keeler, W. (1985). Villagers and the Exemplary Center in Java. *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*, 39, 111–140. <https://doi.org/10.2307/3350989>
- Latif, Y. (2015). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marvasti, A. (2004). *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. Sage Publications Inc.
- Moertono, S. (2017). *Negara Dan Kekuasaan Di Jawa Abad Xvi-Xix*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mubyarto, M., & Bromley, D. W. (2015). Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia: A Development Manifesto For Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/10.22146/jieb.6704>
- Mulyana. (2018). Pulung: Alat Legitimasi Dalam Dunia Perpolitikan Jawa. In S. Y. Sudikam, B. Yohanes, & E. Imawati (Eds.), *Proceding 1 Konggres Kebudayaan Jawa: Pengarusutamaan Kebudayaan Jawa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
- Natsir, M. (2014). *Islam Sebagai Dasar Negara*. Segarsy.
- Ni'am, S., & Nurhayati, A. (2018). Pemikiran Kebangsaan K.H. Achmad Siddiq Dan Implikasinya Dalam Memantapkan Idiologi Pancasila Sebagai Dasar Negara Di Indonesia.

- Nurdin, N. (2017, July 21). PKB: Jas Hijau, Jangan Sekali-kali Hilangkan Jasa Ulama. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2017/07/21/21343551/pkb-jas-hijau-jangan-sekali-kali-hilangkan-jasa-ulama>
- Osberg, L. (2017). On the Limitations of Some Current Usages of the Gini Index. *Review of Income and Wealth*, 63(3), 574–584.
- Patriadi, H. B. (2018). Surviving in the Globalized World Through Local Perspectives: Pesantrens and Sustainable Development. In B. McLellan (Ed.), *Sustainable Future for Human Security: Society, Cities and Governance* (pp. 29–47). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5433-4_3
- Pemberton, J., & Hadikusumo, H. (2003). *Jawa: On The Subject of Java*. Mata Bangsa.
- Prasetyo, H. (2011). Sketsa Mode Of Orality: Sebuah Upaya Pembentukan Praktik Etika. In I. Falk, E. Handoyo, M. S. Mustofa, & K. B. Prasetyo (Eds.), *Proseding Seminar Internasional Moralitas dalam Pembangunan, Kontribusi Etika dalam Pembangunan* (Cet. 1, pp. 53–60). Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Putri, N. N. (2019, April 3). HNW Bicara soal Relevansi antara 'Jas Merah' dan 'Jas Hijau'. *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-4495620/hnw-bicara-soal-relevansi-antara-jas-merah-dan-jas-hijau>
- Robison, R. (2012). *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia* (edisi 1). Komunitas Bambu.

- Rosa, D. V. (2013). Keberanian Menyisir Sejarah Dan Kebudayaan Indonesia Dalam Bentang Timur-Barat. *Ulterasi: Indonesian Journal of Humanities*, 2(2), 323-328.
- Rosa, D. V., & Prasetyo, H. (2019). Perempuan Islam dan Interpretasi Pos-Islamisme: Artikulasi dan Praktik Ruang Dalam Media. In M. N. Ichwan & M. Wildan (Eds.), *Islamisme dan Pos-Islamisme dalam Dinamika Politik Indonesia Kontemporer* (pp. 155-174). SUKA-Press.
- Selian, D., & Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2, 185-194. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>
- Siahaan, H. (2005). *Gerakan Sosial Politik Rakyat, Ontran-ontran Demokrasi: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu/Mata Kuliah Teori Sosial Modern*. Airlangga Univeristy Press.
- Sitthiyot, T., & Holasut, K. (2020). A simple method for measuring inequality. *Palgrave Communications*, 6(1), 112. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-0484-6>
- Soekarno. (1997). *Nawaksara Pidato Presiden Soekarno Di Depan Sidang Umum Ke-Iv Mprs*. Yayasan 'Dianta Medar'.
- Tifatul Sembiring. (2019, November 13). [Twitter]. [@tifsembiring](https://twitter.com/tifsembiring). <https://twitter.com/tifsembiring/status/1194753421728862208>
- Tjondronegoro, S. M. P., & Wiradi, G. (Eds.). (2008). *Dua abad penguasaan tanah: Pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa ke masa*. Yayasan Obor Indonesia.
- Wahid, A. (Ed.). (2009). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia* (Cet. 1). Wahid Institute : Gerakan Bhinneka Tunggal Ika : Maarif.

- Wessing, R. (1997). A Princess from Sunda: Some Aspects of Nyai Roro Kidul. *Asian Folklore Studies*, 56(2), 317–353. <https://doi.org/10.2307/1178730>
- Witoelar, W. (2008, February 10). Politik ekonomi harus jadi panglima. *Sindo*. http://www.perspektif.net/article/article.php?article_id=1021
- Wiyata, A. L. (2013). *Mencari Madura*. Bidik Phronesis Publishing.
- Woodward, M. (2019). Islamicate Civilization And National Islams: Islam Nusantara, West Java And Sundanese Culture. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 8(1), 148–187. <https://doi.org/10.31291/hn.v8i1.542>
- Woodward, M. R. (2004). *Islam Jawa ; Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Lkis Pelangi Aksara.
- Zamroni, I. (2007). Juragan, Kiai dan Politik di Madura. *UNISIA*, 30(65), Article 65. <https://doi.org/10.20885/Unisia.Vol30.Iss65.Art5>